



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO PEREKONOMIAN
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PERHUBUNGAN, PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS PRASUTIO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 222897

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m²/73 m² di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/76 m² di SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 206.000.000

1. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, SUZUKI KATANA JEEP Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.975.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 720.772.481**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.889.747.481**III. HUTANG** Rp. 413.392.160**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.476.355.321

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.